

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan ekonomi sangat diperlukan oleh suatu Negara dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dengan cara mengembangkan semua bidang kegiatan yang ada di suatu Negara tersebut. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata.

Pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen (Sadono Sukirno, 1996:33). Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan perkapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang

Pemerintah dapat mendorong proses pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran dalam perekonomian melalui pengurangan pajak, dan dengan meningkatkan persediaan uang dan menurunkan tingkat .

bunga. Disamping itu, pemerintah dapat mempengaruhi sisi penawaran dalam perekonomian dengan mendorong inisiatif dunia usaha dan menyediakan sumberdaya untuk memperbaiki produktifitas dan penelitian.

Bagi Negara berkembang termasuk Indonesia, pesatnya aliran modal merupakan kesempatan yang bagus guna memperoleh pembiayaan pembangunan ekonomi dimana pembangunan ekonomi yang sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia merupakan suatu usaha berkelanjutan yang diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, sehingga untuk dapat mencapai tujuan itu maka pembangunan nasional dipusatkan pada pertumbuhan ekonomi. Namun karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki tercermin pada tabungan nasional yang masih sedikit sedangkan kebutuhan dana untuk pembangunan ekonomi sangat besar. Maka cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi itu adalah dengan meningkatkan investasi.

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi.

Produk domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Produk Domestik Regional Bruto sebagai jumlah nilai

tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu (BPS, 2014).

**Tabel 1.1**

PDRB ADHK menurut harga konstan 2010 (Miliar Rupiah) Di Pulau Sumatera Tahun 2013

Nama Provinsi	ADHK 2013
Nanggroe Aceh Darusalam	111 992.28
Sumatera Utara	398 779.25
Riau	436 206
Jambi	112 008.70
Sumatera Selatan	232 353.63
Bengkulu	34 329.79
Kep. Bangka Belitung	42 198.23
<b>Pulau Sumatera</b>	<b>1 367 867.88</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pulau Sumatera memiliki luas wilayah 473.481 km<sup>2</sup> yang terbagi ke dalam 10 provinsi yaitu : Provinsi Naggroe Aceh Darusalam, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau untuk melihat kinerja 10 provinsi di pulau Sumatera memang tidak dapat dipisahkan analisis spasial (tata ruang/ geografis). Karena Sepuluh wilayah tersebut kemungkinan besar mempunyai keterkaitan erat secara sosial demografis. Namun, untuk sekedar membandingkan perkembangan perekonomian makro secara relatif antar daerah, maka dapat dilakukan dengan melihat besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing provinsi sebagai indikator makro.

Tabel 1.1 menggambarkan bahwa provinsi Sumatera Utara adalah provinsi yang memiliki nilai PDRB paling tinggi yaitu sebesar 398 779.25, sedangkan provinsi Bengkulu yang memiliki nilai terendah yaitu hanya sebesar 34 329.79 . Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari luas wilayah, sumber daya alam serta dari potensi setiap daerahnya.

Kondisi perekonomian suatu daerah tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam asumsi perekonomian tertutup, suatu negara atau daerah tidak melakukan perdagangan dengan negara atau daerah lain. Perekonomian tertutup memiliki tiga penggunaan untuk barang dan jasa yang dihasilkannya.

Menurut Suparmoko (2002), peranan pemerintah dalam suatu Negara dapat dilihat dari semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam proporsinya terhadap pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, maka semakin besar pula pengeluaran pembangunan. Hal ini mencerminkan bahwa Investasi Pemerintah mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut teori Pertumbuhan Sollow bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan fungsi dari pembentukan modal atau kapital.

Pemerintah dapat mendorong proses pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran dalam perekonomian melalui pengurangan pajak, dan dengan meningkatkan persediaan uang dan menurunkan tingkat bunga.

Disamping itu, pemerintah dapat mempengaruhi sisi penawaran dalam perekonomian dengan mendorong inisiatif dunia usaha dan menyediakan sumberdaya untuk memperbaiki produktifitas dan penelitian.

Ada empat faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yakni sumber daya manusia, sumber daya alam, pembentukan modal dan teknologi. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara berusaha untuk menarik perhatian para investor agar tetap meningkatkan investasinya. Adanya otonomi daerah mengakibatkan desentralisasi kewenangan kepada daerah untuk menentukan pola dan prioritas pembangunan, maka beberapa daerah menetapkan pendekatan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi oleh pemerintah melalui dana pembangunan dan merangsang pertumbuhan investasi swasta yang diharapkan mempunyai efek multiplier terhadap penyerapan tenaga kerja.

Menurut UU No.13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 di sebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu Negara di bedakan dalam 2 (dua) kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja.

Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah umur 15-64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja di sebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang

menyebutkan di atas 17 tahun ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja.

**Tabel 1.2**

Tenaga Kerja di Pulau Sumatera tahun 2013

Provinsi	Bekerja
Nanggroe Aceh Darusalam	1.824.586
Sumatera Utara	5.899.560
Riau	2.481.361
Jambi	1.382.471
Sumatera Selatan	3.464.620
Bengkulu	801.146
Kep. Bangka Belitung	596.786
<b>Pulau Sumatera</b>	<b>16.450.530</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa provinsi sumatera utara memiliki tenaga kerja paling tinggi berjumlah 5.899.560 jiwa, provinsi sumatera selatan tertinggi ke 2 berjumlah 3.464.620 jiwa, dan provinsi Bengkulu memiliki tenaga kerja yang paling rendah dari provinsi yang ada di pulau sumatera berjumlah 801.146 jiwa. Hal ini mencerminkan bahwa pembangunan Sumber Daya Manusia di Pulau Sumatera belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan percepatan ekonomi lokal.

Dalam teori ekonomi makro, dari sisi pengeluaran, pendapatan regional bruto adalah penjumlahan dari berbagai variabel termasuk di dalamnya adalah investasi. Ada beberapa hal yang sebenarnya berpengaruh dalam soal investasi ini. Investasi sendiri dipengaruhi oleh investasi asing dan domestik. Investasi yang

terjadi di daerah terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi dari sektor swasta dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (asing). Investasi pemerintah dilakukan guna menyediakan barang publik.

Investasi diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian, sehingga investasi disebut juga dengan penanaman modal (Sukirno, 2010).

Secara regional, penanaman modal di Pulau Sumatera masih terkonsentrasi di Sumatera Barat, Riau dan Sumatera Selatan baik untuk PMDN maupun PMA. Hal ini, membawa dampak kesenjangan ekonomi antar wilayah. Berikut ini adalah tabel realisasi PMDN dan PMA di pulau Sumatera tahun 2013 :

**Tabel 1.3**

Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Tahun 2013 (Miliar Rupiah) Menurut Provinsi Di Pulau Sumatera

<b>Nama Provinsi</b>	<b>PMDN</b>	<b>PMA</b>
Aceh	3,636.40	94.20
Sumatera Utara	5,068.90	887.50
Riau	4,874.30	1,304.90
Jambi	2,799.60	34.30
Sumatera Selatan	3,396.00	485.90
Bengkulu	1,304.90	22.30
Kep.Bangka Belitung	608.20	112.40
<b>Pulau Sumatera</b>	<b>21,688.3</b>	<b>2,941.5</b>

Sumber : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal

Tabel 1.3 menunjukkan jumlah realisasi investasi yang terdiri dari PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Penanaman modal di Pulau Sumatera terlihat masih terdapat ketimpangan antar wilayah. Investasi di Pulau Sumatera masih terkonsentrasi di provinsi Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Selatan. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk mengangkat potensi unggulan di 7 provinsi tersebut dan mempromosikannya kepada calon investor potensial, kepulauan Bangka Belitung 608.20 miliar adalah provinsi yang memiliki jumlah penanaman modal paling rendah jika dibandingkan dengan 6 provinsi lain di Pulau Sumatera. Hal tersebut disebabkan karena investor tidak begitu tertarik. Sebagai investor akan cenderung memilih untuk menginvestasi modalnya pada perusahaan suatu badan usaha yang sudah memiliki badan hukum dan yang memiliki potensi untuk dapat menghasilkan laba yang besar.

Perbaikan iklim penanaman modal ini sangat penting, karena dengan adanya investasi yang tinggi maka akan menambah produktivitas barang dan jasa. Teori Harrod-Domar juga memberikan kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Kalau tabungan dan investasi rendah, pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara juga akan rendah. Di Indonesia kesempatan berinvestasi semakin terbuka, terutama bagi penanaman modal asing yaitu dengan adanya ASEAN Economic Community (AEC) serta kerjasama lainnya yang mengarah pada kebebasan dalam berekonomi.

Pengeluaran pemerintah sendiri merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Selama ini, tingkat

efektifitas pengeluaran pemerintah dapat diukur melalui seberapa besar pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah disamping ditentukan oleh besarnya pengeluaran pemerintah tersebut juga dipengaruhi oleh besarnya investasi (Sajafii, 2009).

Jumlah penduduk yang besar dalam perekonomian dapat menjadi pendorong maupun penghambat pembangunan. Pandangan optimis mengenai peran penambahan penduduk terhadap pembangunan ekonomi salah satunya dikemukakan oleh Adam Smith (1729-1790) bahwa manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Pertumbuhan penduduk terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang memandang sebagai faktor produksi, peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan jumlah angkatan kerja (labour force). Semakin banyak angkatan kerja semakin meningkat tenaga produktif, sehingga akan meningkatkan produksi. Dengan demikian semakin bertambah jumlah penduduk akan meningkatkan produksi barang dan jasa yang pada gilirannya akan meningkatkan potensi pasar.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul : **“Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera Tahun 2010 -2014“**.

## **B. Batasan Masalah**

Mengingat ruang lingkup pertumbuhan ekonomi daerah sangat luas maka penulis membatasi pembahasan masalah dengan melihat seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera. Dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dibatasi dengan pengeluaran pemerintah, tenaga kerja yang sudah bekerja, jumlah penduduk dan investasi meliputi PMDN dan PMA, Sedangkan pertumbuhan ekonomi menggunakan data PDRB dengan harga konstan tahun 2010.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera tahun 2010-2014.
2. Seberapa besar tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera tahun 2010-2014.
3. Seberapa besar investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera tahun 2010-2014.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera
2. Untuk menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera
3. Untuk menganalisis pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian yang akan dilakukan, kiranya dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Sebagai gambaran bagi pemerintah tentang pengaruh pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam rangka penentuan arah dan kebijakan dalam pembangunan ekonomi.
2. Sebagai tambahan pengetahuan mengenai besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah, tenaga kerja, investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera.